

Implementasi Tujuan *Organizational* pada Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Cibuntu

Implementation of Organizational Goals of the Pedoman Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata at Cibuntu Tourism Village

Gisela Adio Ros Maria¹, Muhammad Fedryansyah², Eva Nuriyah Hidayat³

^{1,2}Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran, Bandung

gisela18004@mail.unpad.ac.id¹, m.fedryansyah@unpad.ac.id², eva.nuriyah@unpad.ac.id³

ABSTRAK

Konsep tujuan *organizational* pada evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui peran dan kepentingan yang dilakukan oleh suatu kelembagaan, baik pemerintah maupun swasta dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi tujuan *organizational* pada Pedoman PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Cibuntu. Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan kegiatan desa wisata, potensi desa, dan data sekunder lain hasil kajian literatur artikel dan jurnal yang relevan. Disamping itu, peneliti melakukan observasi secara langsung dan melakukan *indepth interview* kepada para *stakeholder* yang terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata Cibuntu. Analisis dilakukan berdasarkan peran *stakeholder* atau organisasi yang terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata Cibuntu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Cibuntu dalam mengimplementasikan tujuan *organizational* pada Pedoman PNPM Mandiri Pariwisata berfokus pada tiga aspek, yakni peran pemerintah, pembentukan kelembagaan masyarakat, dan kemitraan dengan *stakeholder*. Adapun peran pemerintah, yakni memberikan motivasi kepada masyarakat, pendampingan, monitoring, dan perizinan. Kemudian pembentukan kelembagaan yang terjadi, yakni Kompepar atau Pokdarwis dan Sanggar Karuhun Manggung dimana keduanya mendukung proses pelaksanaan pengembangan masyarakat di Desa Wisata Cibuntu. Sedangkan kemitraan dengan *stakeholder* yang terjadi, yaitu dengan STP Trisakti pada setiap aspek dan tahap pengembangan desa wisata yang terjadi. Dengan demikian, aktivitas yang dilakukan oleh berbagai *stakeholder* dapat menggambarkan bentuk implementasi terhadap kebijakan yang dimaksudkan.

Kata Kunci: tujuan *organizational*, PNPM Mandiri Pariwisata, Desa Wisata Cibuntu.

ABSTRACT

The concept of organizational objectives in policy evaluation is carried out to determine the roles and interests carried out by an institution, both government and private in implementing a policy. This study aims to describe the implementation of organizational goals in the PNPM Mandiri Tourism Guidelines in Cibuntu Tourism Village. This research was conducted in Cibuntu Tourism Village, Pasawahan District, Kuningan Regency, West Java. This research was conducted using secondary data analysis obtained from reports on tourism village activities, village potential, and other secondary data from literature review of relevant articles and journals. In addition, researchers made direct observations and conducted in-depth interviews with stakeholders involved in the development activities of Cibuntu Tourism Village. The analysis was conducted based on the role of stakeholders or organizations involved in the development activities of Cibuntu Tourism Village. The results showed that Cibuntu Tourism Village in implementing organizational goals in the PNPM Mandiri Tourism Guidelines focuses on three aspects, namely the role of the government, the formation of community institutions, and partnerships with stakeholders. The role of the government is to provide motivation to the community, assistance, monitoring, and licensing. Then the formation of institutions that occurred, namely Kompepar or Pokdarwis and Sanggar Karuhun Manggung where both supported the process of implementing community development in Cibuntu Tourism Village. While partnerships with stakeholders that occur, namely with STP Trisakti in every aspect and stage of tourism village

development that occurs. Thus, activities carried out by various stakeholders can describe the form of implementation of the intended policy.

Keyword: *organizational purpose, PNPM Mandiri Pariwisata, Desa Wisata Cibuntu.*

PENDAHULUAN

Desa wisata merupakan suatu destinasi yang terdapat di desa yang memiliki beberapa aspek unik yang tidak dimiliki perkotaan, seperti aktivitas sosial dan ekonomi, kebudayaan, maupun potensi pendayagunaan sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata (Hadiwijoyo, 2012). Desa wisata sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan umumnya memiliki prasyarat atau keunikan dalam hal keindahan alam dan keutuhan tradisi dan kebudayaan (Masitah, 2019). Dalam hal ini, pendayagunaan sumber daya lokal akan menjadi penting karena dapat meningkatkan perekonomian serta keberfungsian sosial masyarakat (Mustangin et al., 2017).

Terdapat beberapa prasyarat dalam mengembangkan desa wisata, salah satunya pembentukan dan pengembangan lembaga kepariwisataan yang dapat mengakomodasi keberlangsungan desa wisata (Winasih & Setyawan, 2016). Keberadaan lembaga atau organisasi pada suatu desa wisata menjadi hal yang penting mengingat bahwa desa wisata membutuhkan suatu wadah bagi masyarakat untuk mengatur serta mempromosikan serangkaian aktivitas dan kepentingan yang ada (Utomo & Satriawan, 2017). Salah satu lembaga yang diinisiasi dan dibentuk untuk mendukung keberlangsungan desa wisata, yaitu Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis. Pokdarwis menjadi salah satu komponen atau bagian dari masyarakat yang memiliki peran

dan tanggung jawab dalam pendayagunaan sumber daya lokal di daerahnya (Yatmaja, 2019).

Pokdarwis merupakan suatu wadah yang disediakan bagi pelaku pariwisata pada tingkat masyarakat yang memiliki kesadaran untuk mendukung pengembangan destinasi wisata di wilayah tempat tinggalnya (KKN-PPM UGM Buayan Menawan, 2021). Dalam hal ini, pembentukan Pokdarwis bertujuan untuk meningkatkan kontribusi masyarakat lokal agar dapat bermitra dengan berbagai *stakeholder* terkait, mengembangkan perilaku positif masyarakat dengan mendukung nilai-nilai sapta pesona, serta melestarikan dan mendayagunakan sumber daya lokal masyarakat yang ada.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata, yakni membangun kemitraan lintas sektor untuk membangun pariwisata di wilayah binaan. Tujuan pada peraturan tersebut menyasar pada peningkatan kapasitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan pelayanan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan kepariwisataan, dan perwujudan kemitraan atau kolaborasi antara LKM dan *stakeholder* dalam mengembangkan aktivitas desa wisata

(Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata, 2011).

Peraturan tersebut menjadi acuan atau rujukan, baik bagi pemerintah maupun pihak swasta dalam mengembangkan desa wisata yang bersifat memberdayakan sehingga dapat memberikan rasa aman dan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Adapun desa wisata sebagai suatu destinasi pariwisata berkelanjutan perlu melibatkan adanya pendekatan dan kontribusi dari organisasi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola keberlangsungan desa wisata. Dalam hal ini, organisasi yang dimaksud tidak terbatas pada lembaga otoritas lokal atau lembaga swasta saja, melainkan kolaborasi seluruh pihak termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga swasta (Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata, 2011).

Berdasarkan fenomena tersebut, adapun evaluasi kebijakan yang dilakukan perlu menjawab keresahan dan kebutuhan dari implementasi kebijakan sebelumnya. Disamping itu, evaluasi terhadap suatu kebijakan dilakukan untuk mengukur atau menilai dampak atau kebermanfaatan dari suatu kebijakan atau program yang dijalankan oleh pemerintah atau instansi tertentu yang kemudian menghasilkan *output* berupa rekomendasi kebijakan (Jones, 1984).

Jones (1984) mengungkapkan bahwa terdapat tiga tujuan dari evaluasi yang dilaksanakan terhadap kebijakan, yaitu (1) *political evaluation* yang dilakukan untuk kepentingan politik; (2) *organizational evaluation* yang dilakukan untuk kepentingan organisasi, seperti pemerintah dan pihak

swasta; dan *substantive evaluation* yang merupakan evaluasi terhadap isi atau substansi dari kebijakan yang ingin dievaluasi.

Konsep tujuan evaluasi kebijakan secara *organizational* sudah digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Kawengian (2015) terkait kebijakan yang erat hubungannya dengan pencegahan *human trafficking* pada perempuan dan anak yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa evaluasi tujuan *organizational* yang dilakukan pada kebijakan tersebut, yaitu (1) antar organisasi, lembaga, atau instansi terkait tidak menjalankan prosedur komunikasi dan koordinasi yang baik; (2) kebijakan tersebut tidak disosialisasikan kepada masyarakat secara luas; dan (3) instansi terkait tidak menunjukkan keseriusan yang mengarah pada keberhasilan implementasi program dan kebijakan.

Dengan demikian, penelitian yang berjudul *Implementasi Tujuan Organizational pada Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata* berusaha untuk menggambarkan bagaimana evaluasi kelembagaan terhadap penerapan kebijakan yang dimaksud. Harapannya, kebijakan ini dapat mengakomodasi kelembagaan yang erat hubungannya dengan aktivitas pengembangan masyarakat di Desa Cibuntu.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul *Implementasi Tujuan Organizational pada Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat*

(PNPM) *Mandiri Pariwisata* dilakukan melalui tinjauan pustaka yang ditunjang dengan metode analisis data sekunder dari hasil kajian pustaka artikel dan jurnal yang relevan. Analisis terhadap artikel dan jurnal tersebut dilakukan berdasarkan aspek-aspek evaluasi kebijakan *organizational* dalam buku *An Introduction to The Study of Public Policy* menurut Jones (1984).

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi Kebijakan

Rosenbloom (Rosenbloom, 2002) dalam bukunya menyatakan bahwa analisis kebijakan dan evaluasi implementasi menjadi penting bagi para pihak yang terlibat dalam menyediakan pemahaman yang holistik terkait bentuk dan dampak kebijakan yang ditimbulkan yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan implementasi dari kebijakan itu sendiri. Dalam melakukan evaluasi kebijakan secara tepat dan menyeluruh, terdapat prasyarat yang perlu diperhatikan, antara lain (1) fokus evaluasi kebijakan harus dilaksanakan secara cermat dan teliti; (2) menetapkan *output* yang akan dihasilkan dari evaluasi kebijakan yang dilakukan; (3) menetapkan indikator perubahan yang terukur; (4) menetapkan metode yang bervariasi dalam melakukan pengukuran; (5) mendesain evaluasi sesuai kebutuhan sehingga dapat menjangkau kebijakan secara keseluruhan; dan (6) melakukan evaluasi (Hattry et al., 1976).

Pada dasarnya, evaluasi kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan tiga tujuan, yakni *political evaluation*, *organizational evaluation*, dan *substantive*

evaluations (Jones, 1984). Jones (1984) melanjutkan bahwa terdapat dua kepentingan dalam melaksanakan evaluasi suatu kebijakan, yakni melakukan *assessment* terhadap proses evaluasi kebijakan yang kemudian dapat menghindari atau bahkan menilai *progress* yang telah dilalui oleh pemerintah sebagai pihak yang merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta melakukan *assessment* terhadap kebermanfaatan kebijakan yang dicanangkan.

Terdapat beberapa model evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Wollman (2003) dalam bukunya mengungkapkan bahwa terdapat tiga tipe evaluasi kebijakan, yakni *ex-ante evaluation*, *ongoing evaluation*, dan *ex-post evaluation*. Adapun penjelasan dari ketiga tipe tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Ex-ante evaluation* merupakan tipe evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan tersebut diterapkan dan ditetapkan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya preventif terhadap pelaksanaan kebijakan yang belum sempurna. Disamping itu, pelaksanaan evaluasi ini ditujukan untuk menilai dampak yang mungkin ditimbulkan dari penetapan kebijakan tersebut sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan perkiraan dan dapat memberikan kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi penerima manfaat.
2. *Ongoing evaluation* merupakan tipe evaluasi yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Evaluasi ini

dilakukan dalam rangka mengenali dan menimbang dampak dan *output* dari program atau kebijakan yang sedang berjalan. Dengan demikian, *ongoing evaluation* memberikan informasi terkait perbaikan atau revisi yang dibutuhkan terkait implementasi yang diperlukan.

3. *Ex-post evaluation* merupakan model atau tipe evaluasi yang dilakukan pada akhir implementasi suatu kebijakan. Biasanya tipe evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program atau kebijakan. Disamping itu, tipe evaluasi ini melakukan penilaian pula terhadap dampak yang berhasil dicapai selama program atau kebijakan tersebut berlangsung.

Berdasarkan pemaparan dari berbagai ahli, diketahui bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai dan meninjau keberhasilan suatu program atau kebijakan sehingga dapat memberikan kebermanfaatn bagi penerima manfaat dan berbagai *stakeholder* yang terkait.

Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata

Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata (2011), Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata merupakan salah satu pedoman pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat yang berisi konsep yang dibutuhkan berkenaan dengan pengembangan dan pelaksanaan PNPM mandiri. Dalam hal ini,

pedoman PNPM mandiri pariwisata ditetapkan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah pedesaan agar aktivitas pariwisata dapat dilaksanakan dengan tepat dan efisien sesuai dengan permasalahan serta kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Adapun dalam peraturan tersebut dipaparkan tujuan serta sasaran dari pelaksanaan pariwisata mandiri berbasis masyarakat, antara lain (1) memberdayakan dan memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya; (2) mengembangkan kapasitas masyarakat dalam memberdayakan dirinya sendiri; (3) meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengakomodasi layanan kepada masyarakat melalui penetapan kebijakan yang erat kaitannya dengan pariwisata berbasis masyarakat; dan (4) menjalin kerjasama lintas bidang dan sektor dalam rangka mempercepat pembangunan destinasi wisata di daerah binaan pemerintah (Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata, 2011).

Dengan demikian, diharapkan penetapan kebijakan yang erat hubungannya dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat menghasilkan dampak yang signifikan, baik bagi masyarakat itu sendiri, pemerintah, dan pihak swasta. Dalam hal ini, dampak tersebut meliputi terjadinya peningkatan kapasitas dan kapabilitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), tersedianya dokumen RPJM yang berisi peningkatan taraf kehidupan masyarakat melalui pariwisata, terjadi peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan daerah tempat tinggalnya, dan

terjadi peningkatan kapasitas pemerintah serta terjalinnya kemitraan dengan pihak swasta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah

Proses pengembangan masyarakat Desa Wisata Cibuntu lahir dari kajian, temuan, dan identifikasi para dosen dan mahasiswa Pascasarjana Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat (Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, 2021). Sedangkan peran pemerintah dalam mengembangkan Desa Wisata Cibuntu sebagai pendorong memberikan motivasi kepada masyarakat, pendampingan, monitoring, dan perizinan. Maka dari itu, Desa Wisata Cibuntu turut menerapkan kolaborasi dan sinergisme dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti masyarakat, akademisi, pemerintah, dan media (Pusparani & Rianto, 2021).

Pada aktivitas pembukaan akses atau jalur destinasi wisata, Pemerintah Desa Cibuntu termasuk didalamnya aparatur desa tidak menyediakan infrastruktur yang layak untuk mendukung pengembangan desa wisata. Hal tersebut diakibatkan tidak tersedianya dana desa yang dapat dipergunakan untuk membangun infrastruktur, seperti pengadaan jalan beraspal dan penyediaan jalur menuju potensi sumber daya alam yang aman, sehingga pada saat itu untuk infrastruktur masih terkesan seadanya.

Baru pada tahun 2015, Pemerintah Desa mendapatkan dana desa yang dianggarkan khusus bagi pembangunan Desa Wisata

Cibuntu. Hal tersebut menjadi titik terang bagi Desa Cibuntu dan sesegera mungkin merencanakan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Pada tahun 2016, masyarakat bersama-sama secara swadaya melakukan pelebaran jalan yang tadinya hanya jalan setapak yang disusul dengan agenda pembuatan jalur khusus yang lebih layak menuju potensi-potensi sumber daya alam yang tersedia.

Pembentukan Kelembagaan Masyarakat

Pembentukan dan pengembangan fungsi kelembagaan lokal untuk memberdayakan masyarakat menjadi salah satu tujuan dari pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Dumasari (Dumasari, 2014). Salah satu lembaga yang dibentuk, yaitu Kompepar atau yang sekarang dikenal sebagai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kompepar dibentuk oleh Kepala Desa dan aparatur desa dengan memilih secara langsung pemimpin yang dianggap kompeten dan memenuhi kriteria. Proses tersebut dianggap menihilkan peran masyarakat dalam memilih sosok pemimpin Kompepar yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini memberi kesan bahwa aparatur desa tidak menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam proses awal pembentukannya.

Selain itu, proses ini dikhawatirkan dapat menurunkan antusiasme masyarakat apabila pemimpin yang terpilih tidak kompeten atau tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Sebagai lembaga yang berkoordinasi langsung dengan masyarakat, sudah seharusnya kepemimpinan Kompepar dipilih secara langsung oleh masyarakat. Namun, seiring

berjalannya waktu masyarakat akhirnya dilibatkan dalam proses pemilihan pemimpin Kompepar. Dengan demikian, masyarakat merasa turut andil dalam setiap aktivitas pengembangan desa wisata yang dilakukan.

Selain Kompepar, dibentuk pula suatu media kolektif yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan, yaitu Sanggar Karuhun Manggung. Media kolektif ini dibentuk sebagai wadah dalam rangka memberikan dukungan bagi masyarakat untuk melestarikan kebudayaan Desa Cibuntu. Pembentukan lembaga ini bertujuan agar kesenian Desa Cibuntu, termasuk Upacara Adat Sedekah Bumi dapat dikenal dan diwariskan kepada masyarakat Desa Cibuntu dari generasi ke generasi. Pelestarian kesenian dan kebudayaan Desa Cibuntu dilakukan dengan melibatkan anak-anak dan pemuda yang memiliki keinginan untuk terus mempertahankan eksistensi dan keotentikan budaya Desa Cibuntu. Pelibatan anak-anak dan pemuda dalam aktivitas tersebut menunjukkan bahwa STP Trisakti melibatkan keseluruhan elemen masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan dalam mengembangkan desa wisata.

Disamping itu, dalam rangka mendukung aktivitas promosi atau pemasaran Desa Wisata Cibuntu, STP Trisakti bersama masyarakat membentuk suatu komunitas atau media kolektif, yaitu Tim Operator. Tim ini bertugas untuk melakukan promosi dengan menjangkau banyak pihak eksternal. Salah satu perwakilan dari STP Trisakti, Bapak Rianto berkesempatan menjabat selama satu tahun sebagai ketua dalam tim ini. Selama satu tahun,

Bapak Rianto melakukan transfer knowledge kepada anggota tim di bidang promosi dengan tujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang promosi dan pemasaran sehingga dapat mencapai kemandirian di kemudian hari.

Proses *transfer knowledge* dilakukan dengan memberikan gambaran kepada masyarakat yang terlibat terkait aktivitas promosi yang dapat dilakukan sebuah desa wisata. Proses ini dilakukan dengan interaksi dua arah, sehingga masyarakat dapat mengajukan pertanyaan atau komentar terkait proses yang dilakukan. Selain itu, STP Trisakti melibatkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam aktivitas promosi. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat melakukan promosi secara mandiri dan menjangkau lebih banyak pihak eksternal untuk berkunjung ke Desa Wisata Cibuntu.

Kemitraan dengan *Stakeholder*

Sebagaimana diketahui bersama bahwa *stakeholder* menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu pembangunan, tidak terkecuali pembangunan dan pengembangan desa wisata. Adapun *stakeholder* yang terlibat akan disesuaikan dengan permasalahan, kebutuhan, serta potensi masyarakat itu sendiri. Permasalahan dan kebutuhan yang dimaksudkan bermacam-macam, baik pada bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial-budaya.

Desa Wisata Cibuntu sebagai salah satu desa wisata terbaik tahun 2017 pada bidang *hospitality* dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya, yakni

swadaya dan bergotong royong. Disamping itu, mereka memiliki kesamaan visi, yakni menjadikan desanya dikenal oleh masyarakat luas dan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan destinasi wisata yang dimiliki sebaik-baiknya. Dengan demikian, bukan tidak mungkin Desa Wisata Cibuntu mendapatkan berbagai penghargaan, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Namun, dalam mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya lokal yang ada diperlukan peran dari pihak ketiga yang berasal dari eksternal komunitas Desa Wisata Cibuntu. Pihak eksternal atau *stakeholder* yang dimaksud, yakni Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti. STP Trisakti sebagai salah satu perguruan tinggi melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan, yaitu pendampingan desa wisata di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Kuningan. Pendampingan desa wisata tersebut dilakukan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat sebagai penggerak atau eksekutor.

Pendampingan desa wisata yang pertama dan kedua dilaksanakan oleh STP Trisakti adalah pendampingan di Daerah Gunung Salak Endah, Kabupaten Bogor dan Desa Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada tahun 2003 dan 2008. Pendampingan tersebut diinisiasi oleh masyarakat yang peduli terhadap konservasi alam dan budaya. Aktivitas yang dilakukan dalam pendampingan tersebut, meliputi pemetaan potensi dan daya dukung

pariwisata yang ada, pendampingan teknis, dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam hal tata kelola desa wisata. Hasil dari pendampingan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum terlibat secara langsung yang berimplikasi pada belum maksimalnya aktivitas pengembangan desa wisata di Gunung Salak Endah.

Kemudian pada tahun 2011, STP Trisakti kembali mengadakan pendampingan desa wisata kepada Desa Cibuntu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pemilihan Desa Cibuntu dilatarbelakangi oleh kondisi wilayah yang merupakan daerah bekas penambangan pasir atau galian tipe C. Kondisi tersebut mengakibatkan tanah di Desa Cibuntu menjadi tandus dan kering yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan jika tidak ditangani. Selain itu, Desa Cibuntu juga dikategorikan sebagai desa IDT atau Inpres Desa Tertinggal. Hal tersebut diperparah dengan kondisi jalan yang rusak dan adanya polusi udara akibat lalu lintas kendaraan berat yang melintasi Desa Cibuntu.

Dalam melakukan pengembangan masyarakat, STP Trisakti melakukan beberapa kegiatan, antara lain (1) memberikan berbagai pengetahuan dan pemahaman dasar kepada masyarakat terkait proses pengembangan desa wisata; (2) melakukan observasi dan pengkajian secara langsung di Desa Wisata Cibuntu agar keseluruhan potensi, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat dimaksimalkan; (3) merumuskan beberapa produk desa wisata yang didapatkan dari hasil kajian potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia; (4)

memberikan beragam pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan dasar masyarakat dalam mengembangkan desa wisata; dan (5) memberikan berbagai pelatihan tambahan yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengembangan desa wisata yang sudah berjalan.

Dengan adanya kegiatan pengembangan masyarakat Desa Wisata Cibuntu oleh Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat itu sendiri (Latianingsih et al., 2019). Selain itu, saat ini Desa Wisata Cibuntu memiliki tujuh belas (17) produk wisata yang ditawarkan yang terdiri atas wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah (Alfatianda & Djuwendah, 2017). Produk wisata yang dimaksud, antara lain Kampung Kambing, Mata Air Kahuripan, Curug Gongseng, Upacara Adat Sedekah Bumi, Pusat Ekonomi Kreatif Gerabah, Sanggar Seni dan Tari, Kerajinan Suling, Camping Ground, Wisata Offroad, Terapi Ikan, beberapa 8 situs bersejarah, diantaranya Situs Bujal Dayeuh, Situs Hulu Dayeuh, Situs Sahurip Kaler, Situs Sahurip Kidul, dan Situs Cikahuripan, dan beberapa produk wisata lainnya (Kartika et al., 2019).

KESIMPULAN

Desa Wisata Cibuntu dalam mengimplementasikan tujuan *organizational* pada Pedoman PNPM Mandiri Pariwisata berfokus pada tiga aspek, yakni peran pemerintah, pembentukan kelembagaan masyarakat, dan kemitraan dengan *stakeholder*.

Adapun peran pemerintah, yakni memberikan motivasi kepada masyarakat, pendampingan, monitoring, dan perizinan. Kemudian pembentukan kelembagaan yang terjadi, yakni Kompepar atau Pokdarwis dan Sanggar Karuhun Manggung dimana keduanya mendukung proses pelaksanaan pengembangan masyarakat di Desa Wisata Cibuntu. Sedangkan kemitraan dengan *stakeholder* yang terjadi, yaitu dengan STP Trisakti pada setiap aspek dan tahap pengembangan desa wisata yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatianda, C., & Djuwendah, E. (2017). Dampak Ekowisata dan Agrowisata (Eko-Agrowisata) Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cibuntu (Studi Kasus di Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*.
- Dumasari. (2014). *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). Perencanaan pariwisata perdesaan berbasis masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep). In *Graha Ilmu : Yogyakarta*.
- Hattry, H., Blair, L., Fisk, D., & Kimmel, W. (1976). *Program Analysis for State and Local Government*. The Urban Institute.
- Jones, C. O. (1984). *An Introduction to The Study of Public Policy* (Third). Brooks/Cole Publishing Company.
- Kartika, T., Afriza, L., & Fajri, K. (2019). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*.
<https://doi.org/10.17509/jithor.v2i1.1642>

- Kawengian, D. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *E-Journal Acta Diurna*, 4(5), 1–15.
- KKN-PPM UGM Buayan Menawan. (2021). *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Universitas Gadjah Mada.
- Latianingsih, N., Mariam, I., & Susyanti, D. W. (2019). Model Pengembangan Kebijakan Desa Wisata dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Homestay di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Law & Justice Jurnal*.
- Masitah, I. (2019). Pengembangan Desa Wisata oleh Pemerintah Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Pub. L. No. KM.18/HM.001/MKP/2011 (2011).
- Mustangin, Kusniawati, D., Setyaningrum, B., Prasetyawati, E., & Islami, N. P. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*.
<https://doi.org/10.24198/jsg.v2i1.15282>
- Pusparani, P., & Rianto, R. (2021). Implementasi Konsep Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Cibuntu. *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*.
<https://doi.org/10.32528/sw.v4i1.5389>
- Rosenbloom, H. D. (2002). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector* (5th ed.). Mc-Graw-Hill.
- Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. (2021). *STP TRISAKTI BUKAN HANYA SEKEDAR “BIDAN” YANG BERHASIL MEMBANTU PROSES KELAHIRAN DESA WISATA CIBUNTU*.
<https://stptrisakti.ac.id/stp-trisakti-bukan-hanya-sekedar-bidan-yang-berhasil-membantu-proses-kelahiran-desa-wisata-cibuntu/>
- Utomo, S. J., & Satriawan, B. (2017). Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. *Jurnal Neo-Bis*, 11(2), 142–153.
- Winasih, A., & Setyawan, D. (2016). Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan dalam Peningkatan Sumber Daya Alam (SDA). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 12–16.
- Wollman, H. (2003). *Evaluation in Public-Sector Reform*. Edward Elgar.
- Yatmaja, P. T. (2019). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(1), 27–36.